

BAB VI

KESIMPULAN

Perjalanan demokrasi Thailand sejak tahun 2006 mencerminkan paradoks bahwa masyarakat sipil—yang selama ini dipuji sebagai mesin demokratisasi—juga dapat menjadi aktor kunci dalam memperkuat otoritarianisme. Studi ini dimulai dengan isu kemunduran demokrasi di sebuah negara di mana kompetisi politik bukan hanya pertarungan antara negara dan masyarakat, tetapi juga perjuangan di dalam masyarakat itu sendiri. Analisis menunjukkan bahwa *Thai Bhakdi* dan “We Support Prayuth”—dua gerakan yang muncul dari akar ideologis berbeda—tetap bersatu dalam mempertahankan status quo monarki-militer. Dengan menggunakan narasi tentang stabilitas, ketertiban moral, dan identitas nasional, kelompok-kelompok ini telah mengubah aktivisme sipil menjadi alat yang justru membatasi, bukan memperluas, ruang demokrasi.

Argumen dalam artikel ini berlandaskan pada kerangka *authoritarian civil society*: masyarakat sipil tidak secara inheren bersifat demokratis. Dalam konteks Thailand, polarisasi telah membelah kehidupan sipil menjadi dua kubu yang berlawanan, dengan salah satu pihak secara aktif memperkuat alat-alat penindasan. Temuan menunjukkan bahwa kelompok-kelompok ini tidak sekadar meniru propaganda negara; mereka berinovasi, berorganisasi, dan melegitimasi kekuasaan otoriter melalui aktivisme jalanan dan kampanye digital. Dinamika ini mengaburkan batas tradisional antara negara dan masyarakat, menghasilkan apa yang dapat disebut sebagai “perisai sipil” bagi kekuasaan otoriter.

Akibatnya, demokrasi terjebak antara aspirasi dan kemunduran. Aktor pro-demokrasi harus berhadapan tidak hanya dengan tekanan hukum yang mengekang dan tekanan negara, tetapi juga dengan permusuhan moral dan ideologis dari sesama warga. Monarki dan militer mempertahankan dominasinya bukan hanya melalui kekuasaan formal, tetapi juga melalui partisipasi sukarela dari jaringan loyalis yang menggambarkan perbedaan pendapat sebagai ancaman bagi jiwa bangsa. Konvergensi antara otoritas institusional dan mobilisasi akar rumput yang berseberangan menjadikan reformasi sebagai perjuangan yang berat.

Sebagai kesimpulan, kasus Thailand menyoroti pelajaran yang lebih luas bagi teori dan praktik demokrasi: kesehatan demokrasi tidak dapat diukur hanya dari seberapa hidup masyarakat sipilnya, tetapi juga dari arah energi tersebut dimobilisasi. Ketika partisipasi sipil diarahkan untuk mempertahankan struktur kekuasaan yang eksklusif, hasilnya bukan konsolidasi, melainkan erosi norma-norma demokratis. Bagi Thailand, tantangan ke depan bukan hanya memperluas kebebasan politik, tetapi juga merebut kembali gagasan masyarakat sipil sebagai ruang bagi pluralisme, akuntabilitas, dan partisipasi politik yang inklusif.